RENJA

(Rencana Kerja) Tahun 2025

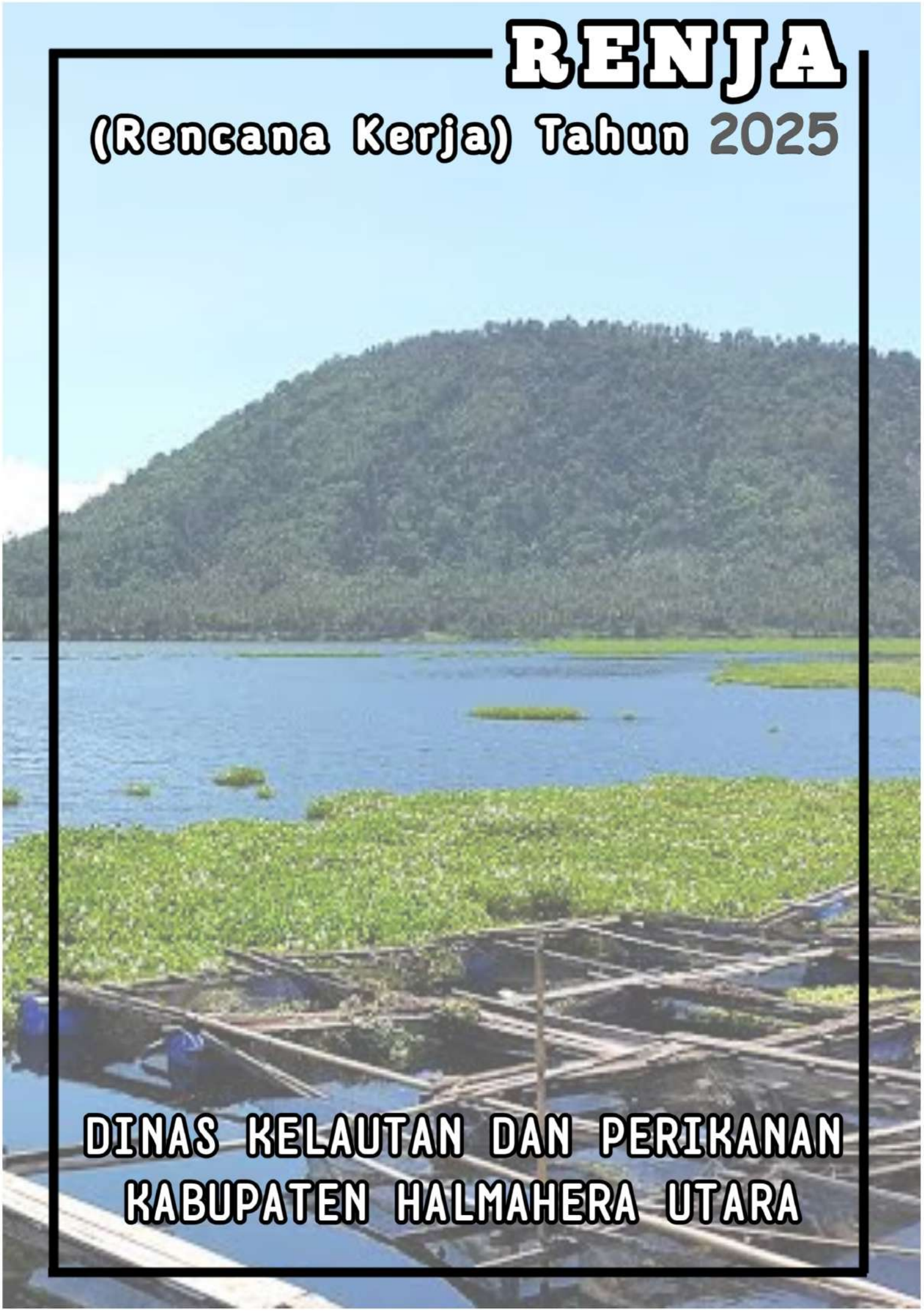

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 ini dapat disusun.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2025 ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program. Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menuju good governance yang tercermin dalam visi Bupati Halmahera Utara yang telah ditetapkan, yaitu : ***"Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan"***

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan ini masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan sehingga dapat ditetapkan sebagai rencana kerja 2025.

Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat memenuhi konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Victor O Mangimbulude.ST
Pembina / IVa
NIP. 19711021 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautandan Perikanan 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan 16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 21

2.5. Penelaahan Usulan Progradan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2. Tujuan dan Sarsaran Renja Dinas kelautan dan Perikanan 26

3.3. Program dan Kegiatan 26

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 31

BAB V. PENUTUP 35

LAMPIRAN 36

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan pedoman dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui perencanaan yang matang diharapkan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terencana, lebih berkualitas serta tepat sasaran sesuai dengan target perencanaan serta memberikan hasil yang memuaskan. Penyusunan perencanaan pembangunan berpedoman pada undang-undang dan peraturan sebagai dasar hukum dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis.

Rencana Kerja sebagai langkah operasional dari perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang dijabarkan tahunan antara lain dalam penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target sesuai program, kebijakan dan sasaran yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, kebutuhan riil masyarakat melalui hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2025, serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Halmahera Utara, pemerintah provinsi Maluku utara dan pemerintah pusat. Renja disusun melalui tahapan persiapan penyusunan berupa pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusunan rancangan Renja berupa perumusan rancangan dan penyajian dan pembahasan rancangan, serta penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, rencana lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan maju. Pagu indikatif tersebut menjadi acuan dalam proses penyusunan penganggaran pada tahun 2025.

Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dalam merumuskan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif mengacu pada RKPD Kabupaten Halmahera Utara. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pagu pendanaan serta perkiraan maju. Selain mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara juga disinkronkan dengan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengacu pada kebijakan, program Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Selain itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 harus selaras dengan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya Dokumen Renja ini akan menjadi landasan untuk proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1417, 2019);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2019 (ditambahakan)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 46 Tahun 2016
13. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2022
14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tahun anggaran 2025. untuk memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja dan pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 antara lain adalah :

- Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025.
- Untuk meningkatkan sinergitas dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat terlaksana lebih efektif, efisien dan mengakomodir

semua aspirasi masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, sehingga bab-bab selanjutnya mudah dipahami.

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable* Developme*nt Goals)*;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III Tujuan DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelutan dan Perikanan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
    a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
    b. Pencapaian SDM,
    c. Pengentasan kemiskinan,
    d. Pencapaian NSPK dan SPM,
    e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
    f. Pengembangan daerah terisolir,
    g. Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
    - Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Kondisi Kinerja

Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi sumber daya alam meliputi sumberdaya daratan dan lautan. Pengelolaan potensi sumberdaya alam hendaknya dilakukan dengan bijak, aman, lestari dan berkesinambungan. Pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan benar diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah salah satunya di sektor kelautan dan perikanan. Pemanfaatan potensi di sektor kelautan dan perikanan meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum, perikanan budidaya air laut, air tawar dan air payau, pengolahan ikan, serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir.

Indikator kinerja pada sektor kelautan dan perikanan dapat diukur melalui produksi yang dicapai tiap tahunnya dibandingkan dengan target. Produksi perikanan Tahun 2023 berjumlah 25.415,52 ton yang meliputi perikanan tangkap sebesar 25.082 ton dan perikanan budidaya sebesar 333,52 ton, dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi Produksi perikanan Budidaya, dari target sebesar 431,7 Ton hanya mencapai 333,52 ton. Dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 maka produksi perikanan tidak mencapai taget. Dengan persentase capaian hanya 77,25% dari target produksi.
b) Realisasi Produksi perikanan Tangkap, dari target sebesar 26.737 ton hanya mencapai 25.082 ton. Dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 maka produksi perikanan tangkap tidak mencapai taget. Dengan persentase capaian hanya 93,81% dari target produksi.
c) Realisasi peningkatan produk olahan perikanan, dari target sebesar 1.393 Ton hanya mencapai 1110,Ton. Dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 maka produksi pengolahan tidak mencapai target. Dengan persentase

capaian hanya 79% dari target produksi. Tetapi untuk Angka Konsumsi ikan mencapai 64,8 kg/kapita dari target 62,45 Kg/Kapita

b. Penyebab Menurunnya Produksi Perikanan Tahun 2023 :

- Perikanan Tangkap, menurunnya hasil tangkapan ikan dikarenakan adanya tekanan berupa indikasi penurunan kualitas perairan dengan musim atau cuaca yang tidak mendukung dan aktivitas penangkapan lebih ketika suatu jenis ikan diambil lebih cepat dibanding pembiakan stok speies tersebut untuik menghasilkan penggantinya (over fishing) dan penangkapan ikan yang merusak (destruktiv fishing), serta masih kurangnya sarana penangkapan ikan (API) yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas terbatas

- Perikanan Budidaya, mengalami kendala dengan kurangnya pakan dan modal usaha, masih kurangnya pemahaman secara teknis dalam pengembangan usaha Budidaya Air Tawar dan Payau, beralih profesinya pembudidaya yang sudah tidak aktif lagi, serta tenggelamnya KJA di Lingkar danau yang mengakibatkan banyak ikan yang mati.

- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, masalah yang dihadapi oleh unit-unit pengolahan ikan adalah keterbatasan modal usaha untuk pengadaan sarana dan prasarana/ peralatan pengolahan serta pengadaan bahan baku pengolahan. Kreatifitas nelayan dalam mengelola ikan pasca penangkapan rendah. Tetapi dalam konsumsi tingkat konsumsi ikan masyarakat relatif masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Namun jika melihat target RPJMD dengan realisasi tahun 2023 maka realisasi konsumsi ikan lebih tinggi dari pada target RPJMD.

c. Kebijakan dan Tindakan dalam Mengatasi Permasalahan

Solusi yang akan dilaksanakan dari permasalahan yang di maksud adalah 1.Peningkatan produksi dengan pengembangan sarpras di bidang tangkap dan budidaya.

2.Pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur dan pembudidaya laut dan darat,

3. Serta penambahan modal usaha serta pangsa pasar yang menunjang produksi perikanan..

Dari hasil evaluasi pencapaian target dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi capaian kinerja

perangkat daerah di Tahun 2023, baik pada capaian hasil produksi maupun realisasi penganggaran.

c. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target RPJMD dengan indikator kinerja produksi perikanan adalah :

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan :
  - Penyediaan Prsasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan :
  - Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/KotaPembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil.
  - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.

d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Indikator kinerja dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu meliputi program/kegiatan bersifat rutin dan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan meliputi :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
2) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota;

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
2) Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
3) Pengelola pembudidaya ikan.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1) Pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2) Pengawasan sumber daya perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

5.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1) Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
2) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;

3) Penyediaan penyaluran bahan baku industry pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

e. Reviuw terhadap pelaksanaan program pada Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Review terhadap Pelaksanaan Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja.

Pada tahun 2023 secara keseluruhan program kegiatan tidak memenuhi target kinerja (tingkat capaian program 100%) yaitu program-program yang bersifat rutin yaitu Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program pengelolaan Budidaya Perikanan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dalam realisasi fisik berdasarkan Indikator Kinerja Utama ada program yang kinerjanya mencapai target dengan tingkat capaian 100%' yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang walaupun dalam realisasi anggarannya tidak mencapai 100 % dan akan direalisasikan dalam tahun anggaran 2024 dalam kegiatan pembayaran hutang belanja, sehingga berpengaruh pada pengelolaan anggaran tahun 2025..

Harapan untuk program pembangunan diprediksikan di tahun 2025 indikator kinerja pelaksanaan program akan mencapai 100% pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

- Review terhadap Pelaksanaan Program yang Melebihi Target Kinerja.

Pada tahun 2023 tidak ada program kegiatan yang melampaui target , hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencapaian kapasitas sumber daya manusia terhadap pencapaian target produksi, dan pengaruh perencanaan terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja dengan komitmen Organisasi Perangkat Daerah sebagai mitra masyarakat.

Diharapkan pada tahun 2025 direncanakan ada faktor pendukung capaian program tahun yang akan datang antara lain adalah adanya peningkatan kualitas dan

kuantitas sosial, tingkat kesadaran masyarakat untuk berproduksi dalam pengolahan perikanan. Kebijakan dan perumusan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada program dan kegiatan ini adalah sesuai skala prioritas dan berdasarkan kebutuhan harus dilakukan untuk meningkatkan capaian target tersebut antara lain :

- Meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan sosialisasi, pembinaan teknis dan kelembagaan kelompok usaha di bidang perikanan.
- Meningkatkan SDM Pelaku Usaha Perikanan
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana produksi tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran, meningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan serta sarana prasarana Balai Benih Ikan dalam rangka mendukung eksistensi Program Minapolitan Budidaya dan Tangkap di Kabupaten Halmahera Utara dan yang paling utama adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan di Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengkaji kembali nilai target capaian indikator kinerja tiap tahun sesuai dengan kondisi dan hasil evaluasi capaian kinerja.
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah (ditambahkan)

f. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara

Sampai dengan tahun 2023 Realisasi Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel T-C.29 pada lampiran 1.

Anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja program dan kegiatan tersebut didukung dari dana APBD Kabupaten Halmahera Utara baik dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta anggaran Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan, sedangkan anggaran belanja langsung meliputi belanja program dan kegiatan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 pada APBD setelah Perubahan mengalami kenaikan dari pagu sebelumnya yaitu sebesar Rp.11.265.617.394 menjadi Rp. 11.973.699.136 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU Rp. 9.013.699.136,- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 2.960.000.000,-

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Indikator kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dapat dikaji dari Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan Pilihan bidang Kelautan dan Perikanan meliputi :

1. Nilai Tukar Nelayan
2. Produksi Perikanan
3. Produksi pengolahan hasil perikanan.

Selain itu kajian indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara berdasar Indikator Kinerja Utama meliputi :

1. Persentase peningkatan Nilai Tukar Nelayan
2. Persentase peningkatan produksi perikanan.
3. Persentase peningkatan produksi ikan olahan.

Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama diukur berdasarkan realisasi capaian dibandingkan dengan target. Target tersebut diukur dari jumlah volume peningkatan produksi yang diinginkan dibandingkan dengan volume produksi pada kondisi kinerja awal (tahun ke nol), sehingga realisasi capaian peningkatan produksi juga dibandingkan dengan volume produksi tahun ke nol penghitungan target.

Indikator Kinerja Utama tahun 2023 yang telah disesuaikan yang meliputi indikator kinerja utama dan target kinerja dengan rata-rata capaian di atas 100 % hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dapat dikatakan berhasil. Indikator tersebut meliputi

1) Nilai tukar nelayan rata-rata 106,68
2) Nilai tukar pembudidaya rata-rata 109,00

3) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan tingkat capaian 93,81%
4) persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dengan tingkat capaian 77,25%.
5) persentase peningkatan produksi ikan olahan dengan tingkat capaian 103,763 %

Data Analisis kinerja pelayanan dinas kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel T-C.30, Lampiran 2.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 yaitu mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran peningkatan produksi, perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun ikan olahan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan,ditunjang dengan tingginya konsumsi ikan perkapita. Peningkatan produksi perikanan ditunjang dengan tingginya konsumsi ikan perkapita.

Ada sebagian kecil kegiatan peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan dalam 1 tahun terakhir cukup signifikan dan memenuhi target kinerja. Tercapainya target kinerja merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dan sebagai upaya dalam mendukung peran peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara poin ke empat yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara, yaitu melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan tanpa harus mengabaikan sektor-sektor usaha lain yang potensial bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 sebagai rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari permasalahan dan isu-isu di lingkup kelautan dan perikanan yang semakin kritis dan dinamis.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk sumberdaya pesisir di beberapa wilayah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya kelautan dan perikanan akibat kegiatan eksploitasi yang berlebihan dan penagkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti pemboman ikn dan potasium. Pada sektor perikanan tangkap pada perairan kepulauan atau pada jalur IA (0-2) mil laut kuantitas produksi diindikasikan mulai berkurang, sehingga posisi fishing ground semakin jauh sekitar 4 mil laut mengakibatkan waktu trip penangkapan dan biaya operasional nelayan bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas jumlah armada tangkap di atas 3 GT, memasang rumpon di beberapa titik sebagai lokasi fishing ground baru. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian dan mempertahankan fishing ground yang ada, perlu dilakukan sosialissasi untuk memberikan pemahaman mengenai kelestarian sumberdaya laut dan pesisir dan meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk Peningkatan produksi budidaya harus ditunjang oleh ketersediaan benih dan kualitas benih yang baik dan bersertifikat serta kebutuhan pakan ikan yang murah. Saat ini ketersediaan benih bersertifikat dan induk ikan unggul di Kabupaten Halmahera Utara masih terbatas. Ketersediaan benih dan induk ikan baik kualitas maupun kuantitasnya yang menunjang keberhasilan usaha budidaya, oleh karena itu permasalahan benih dan induk ikan serta pakan ikan menjadi sangat penting. Benih ikan yang bermutu dihasilkan oleh induk yang unggul sesuai Standar Nasional Indonesia dan penanganan yang sesuai dengan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih yang berkualitas maka dilakukan

sertifikasi benih ikan untuk Hatchery dan Balai Benih Ikan (BBI). Selain itu untuk meningkatkan kualitas produksi budidaya juga dilakukan pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Program pembangunan perikanan budidaya sudah diarahkan dalam program pengembangan kawasan Minapolitan budidaya yang tersentral. di Kabupaten Halmahera Utara pengembangan kawasan mina politan belum di terapkan sehingga proses percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat akan cepat meningkat, sehingga perlu dilakukan kajian kawasan pengembangan minapolitan.

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Halmahera Utara sudah tergolong tinggi. Ini ditandai dengan terserapnya hasil produksi perikanan dalam pasar lokal. Peningkatan konsumsi ikan akan berperan sangat strategis bagi pendorong produksi perikanan yang diharapkan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan asupan protein bersumber dari ikan.

a. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan.
2. Masih maraknya penangkapan ikan dengan cara destructive.
3. Terbatasnya jumlah petugas teknis lapangan dan penyuluh perikanan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara (17 kecamatan).
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan sehingga kualitas kelompok usaha secara administratif belum optimal.
5. Masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan pada umumnya menyebabkan kurangnya pemahaman dan adopsi informasi teknologi perikanan.

6. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha perikanan dalam memperlakukan hasil produksi sebagai upaya peningkatan kualitas sehingga bernilai jual tinggi dan memenuhi standar ekspor.
7. Kurangnya promosi mengenai produk asal ikan dan kurang berkembangnya jaringan pemasaran yang ada.
8. Upaya peningkatan usaha sektor perikanan yang tidak didukung oleh akses layanan permodalan yang sesuai kemampuan pelaku usaha perikanan.

b. Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut :

Kondisi iklim (cuaca) yang tidak menentu dan sulit diprediksi, mempengaruhi produktivitas usaha penangkapan ikan.

1. Wilayah pesisir Kabupaten Halmahera Utara khususnya daerah kecamatan loloda utara dan loloda kepulauan merupakan perairan laut yang memiliki gelombang yang tinggi dan rawan terhadap bencana alam laut.
2. Infrastruktur jalan yang kurang memadai terutama jalan produksi di wilayah pesisir Galela Utara dan Loloda Utara sehingga kelancaran arus kegiatan perekonomian belum optimal.
3. Sebagian besar rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan merupakan rumah tangga dengan kategori miskin.
4. Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih belum optimal akibat kurang maksimalnya pemetaan potensi pesisir, kelautan dan perikanan.

c. Peluang

Peluang dalam mendukung peningkatan pelayanan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya lahan budidaya ikan yang potensial, luas perairan laut yang besar mendukung untuk pengembangan kegiatan perekonomian sektor kelautan dan perikanan.

2. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejalan dengan program pembangunan nasional dan program pembangunan provinsi di bidang kelautan dan perikanan.
3. Potensi sumberdaya perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
4. Permintaan pasar akan produk perikanan yang berkualitas semakin meningkat.
5. Sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai di Wosia cukup memadai dan strategis.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 antara lain adalah sebagai berikut :

a. Guna meningkatkan perkembangan produksi perikanan dalam rangka pencapaian target maka perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana di bidang kelautan dan perikanan serta peningkatan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan melalui pembinaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.
b. Meningkatkan kualitas produk asal ikan baik segar maupun olahan sehingga daya saing produk asal ikan dapat memenuhi standar nasional dan berkualitas ekspor.
c. Untuk memenuhi permintaan benih ikan dan ikan konsumsi melalui peningkatan jumlah induk unggul dan peningkatan sarana prasarana produksi budidaya ikan.
d. Dalam rangka mengatasi terbatasnya modal usaha diperlukan fasilitasi akses modal usaha melalui lembaga-lembaga ekonomi pedesaan dan dukungan lembaga-lembaga keuangan serta fasilitasi peningkatan jaminan terhadap modal usaha melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Pembudidaya (SEHAT) .
e. Sebagai upaya peningkatan pelayanan oleh aparatur diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan peningkatan sarana prasarana aparatur.

f. Rencana program dan kegiatan disusun atas pertimbangan harus sejalan dan searah dengan visi dan misi kepala daerah serta kebijakan pemerintah provinsi dan nasional, menjaring kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, sebagai jawaban atas perkembangan dan permasalahan di bidang kelautan dan perikanan. \

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Program pilihan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah meliputi :

1) Program Pengelolaan Budidaya Perikanan;
2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan hasil analisis kebutuhan antara lain meliputi program dan kegiatan pada program rutin dan pilihan tidak terdapat perubahan, tetapi perubahan terdapat pada alokasi besaran dana. Perbedaan jumlah dana tersebut disebabkan adanya penyesuaian rancangan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Pada Tahun 2025 ada program prioritas yang dilaksanakan yaitu, Program Pengelolaan Budidaya Perikanan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pemasaran Hasil Perikanan. Rincian review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, penjaringan kebutuhan masyarakat melalui acara pertemuan dan sosialisasi, serta melalui surat dan proposal yang dikirimkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.

Usulan kegiatan masyarakat tahun 2025 pada umumnya selaras dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program yang direncanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara. Usulan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bantuan benih ikan, Induk Ikan dan sarana prasarana budidaya merupakan program dalam rangka memfasilitasi pengembangan usaha budidaya ikan konsumsi. Bantuan benih dan sarana prasarana budidaya ikan akan dialokasikan pada wilayah yang berpotensi dan sesuai dengan komoditas yang diunggulkan di wilayah itu. Disamping itu volume disesuaikan dengan potensi lahan budidaya dan ketersediaan benih ikan.
b. Pelatihan/pembinaan teknis budidaya ikan dan teknis penanganan ikan pasca panen baik segar maupun olahan ikan yang dilaksanakan rutin sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, sehingga usulan pelatihan teknis menjadi prioritas utama yang direncanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara.
c. Sarana Prasarana dan alat bantu penangkapan ikan pada tahun 2025 akan dialokasikan sarana prasarana tersebut dengan kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan nelayan.
d. Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran pada tahun 2025 yang dialokasikan untuk pengembangan dan penguatan kelompok sasaran di tahun sebelumnya.
e. Penguatan kelembagaan kelompok (Pokdakan, KUB dan Poklashar) akan dialokasikan dengan prioritas penumbuhan koperasi perikanan.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan dari masyarakat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.32, pada lampiran 4.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2021-2026 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2026 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah "kemaritiman dan kelautan" dan "kedaulatan pangan". Selanjutnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu "Mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2026 adalah:

1) Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke1 dan ke 4, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kedaulatan.
2) Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan keberlanjutan.
3) Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda

pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kesejahteraan.

4) Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang kompeten dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang inovatif. Arah kebijakan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan 3 misi yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
5) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Arah kebijakan ini ditetapkan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi.

Selaras dengan agenda prioritas nasional, prioritas pembangunan di Provinsi Maluku Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara dengan visi mewujudkan "MALUT sebagai Lumbung Ikan Nasional yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan " dengan motto " Dari Laut Kita Bangun MALUT " serta penyatuan komitmen bersama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk " Mewujudkan Sektor Kelautan Dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional". Berdasarkan visi dan misi pembangunan nasional serta visi dan misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dari identifikasi permasalahan yang timbul maka ditentukan isu strategis kelautan dan perikanan yang meliputi :

1. Produksi Perikanan Maluku Utara sebagian besar di bawa ke luar daerah dan tidak terserap di pasar local menyebabkan kontribusi sector ini terhadap PDRB masih sangat minim;
2. Kuantitas dan Kualitas SDM Keluatan dan Perikanan belum optimal;
3. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan didorong melalui berbagai upaya, antara lain :

a. Perubahan mainset nelayan, pembudidaya dan akses peningkatan kemampuan teknis dan permodalan untuk peningkatan daya saing daerah;
b. Peningkatan perikanan skala usaha masyarakat untuk peningktan pendapatan;
c. Mendorong penempatan komoditas bernilai ekonomis tinggi serta mengembangkan produk bernilai tambah;

4. Produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya;

5. Peningkatan eksport dan investasi di bidang kelautan dan perikanan;
6. Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) sekaligus optimalisasi pengawasannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 dan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas ke-4 pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, yaitu : "*Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara, yaitu melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan tanpa harus mengabaikan sektor-sektor usaha lain yang potensial bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat*" maka ditetapkan tujuan dan sasaran beserta target indicator sasaran Rencana kerja tahun 2025 beserta prognosis tahun berikutnya.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu "*Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang professional, mandiri, unggul dan Berdaya Saing*" yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan ke dalam 1 (satu) program rutin yang dijabarkan dalam 5 program pilihan yang dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - (i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - (ii) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - (iii) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - (iv) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - (v) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   - (vi) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - (vii) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - (viii) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - (ix) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - (x) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   - (xi) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - (xii) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - (xiii) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - (xiv) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - (xv) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - (xvi) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - (xvii) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - (xviii) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - (xix) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(xx) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(xxi) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(xxii) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(xxiii) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(xxiv) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

7. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

(xxv) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

(xxvi) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

8. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

(xxvii) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

(xxviii) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

III. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

9. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(xxix) Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

10. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

(xxx) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

(xxxi) Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

11. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

(xxxii) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(xxxiii) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(xxxiv) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(xxxv) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

12. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

(xxxvi) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

(xxxvii) Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

13. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

(xxxviii) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

14. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

(xxxix) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

15. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

(xl) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok sasaran dari program-program Dinas Kelautan dan Perikanan adalah nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar/pedagang ikan yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Pagu indikatif yang direncanakan untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 sebesar Rp. 10,912,482,057.00 yang terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) Rp.5,960,000,000.00 dan dana alokasi umum (DAU) Rp. 4,952,482,057.00 . Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 disampaikan pada tabel T-C.33, pada lampiran 5.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara bidang kelautan dan perikanan tahun 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025, yang merupakan pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun sebelumnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dengan program - program yang dilaksanakan adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Progran Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Perencanaan penganggaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 mengacu pada pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan anggaran program dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2025.

Kepala Dinas,

Victor O Mangimbulude, ST
Pembina / IVa
NIP. 19721021 200212 1 003

Lampiran 1

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

KODE					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Urusan Pilihan							
25					**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian kinerja perangkat daerah sesuai Laporan Kinerja (LKj)**	**90%**	**4.760.407.041**	**77**	**3.664.904.914**	**105**	**77**
3	**25**	**01**	**02:01**		**Perencanaan. Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah**	100%	**486.544.350**	100%	**144.421.000**	100	**29,68**
3	**25**	**01**	02:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	327.752.350	3 Dok	79.223.000	100	**24,17**
3	**25**	1	02:01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	100	**100,00**
3	25	1	02:01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.000.000	1 Dok	360.000	100	**36,00**
3	25	1	02:01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	100	**100,00**
3	25	1	02:01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKDP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.000.000	1 Dok	1.000.000	100	**100,00**
3	25	1	02:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	12.854.000	-	-	-	**-**
3	25	1	02:01	07	Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dok	140.938.000	8	60.838.000	100	**43,17**
3	**25**	**1**	**02:02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)**	**100%**	**2.986.387.806**	**100%**	**2.700.890.155**	100	**90,44**
3	**25**	**1**	**02:02**	**1**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	2.981.047.806	30	2.700.890.155	100	**90,60**

KODE				PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	25	1	02:02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	2.000.000	-	-	-	-
3	25	1	02:02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dok	2.000.000	-	-	-	-
3	25	1	02:02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.340.000	-	-	-	-
3	**25**	**1**	**02:05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)**	**100%**	**52.500.000**	**50%**	**50.388.000**	50	**95,98**
3	25	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28	17.500.000	30	17.500.000	107,143	**100,00**
3	25	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	35.000.000	2	32.888.000	100	**93,97**
3	**25**	**1**	**02:06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Cakupan administrasi umum perangkat daerah (persen)**	**90%**	**393.883.000**	**83,30%**	**339.239.100**	**92,56%**	**86,13**
3	25	1	02:06	1	Penyediaanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	32.500.000	12	32.500.000	75	**100,00**
3	25	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1.000.000	0	-	-	-
3	25	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12.000.000	9	9.066.000	75	75,55
3	25	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	10.000.000	12	3.489.000	100	34,89
3	25	1	02:06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	6.000.000	7	5.954.000	29	99,23

KODE				PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	25	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	332.383.000	7	288.230.100	39	86,72
3	**25**	**1**	**02:08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	**100%**	**431.861.511**	**100%**	**141.786.635**	**100%**	32,83
3	25	1	02:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	60.339.674	12	55.977.500	100	92,77
3	25	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	72.000.000	12	60.484.135	100	84,01
3	25	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3.000.000	6	3.000.000	100	100,00
3	25	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	30.521.837	9	22.325.000	75	73,14
					Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan gedung kantor	1	266.000.000	1	50.000.000	100	18,80
3	**25**	**1**	**02:09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)**	100%	**409.230.374**	100%	**288.180.024**	100	70,42
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	288.370.437	5	277.480.024	100	96,223
3	25	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan . Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	120.859.937	1	10.700.000	100	8,853
3	**25**	**3**	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**	**26.737**	**4.303.183.551**	**25.082**	**2.708.294.400**	**82,64%**	62,94
3	**25**	**3**	**02:01**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk.Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun**	**100%**	**3.013.600.000**	**100%**	**2.640.717.400**	**50%**	87,63
3	25	3	02:01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	50.000.000,00	2	4.893.000,00	100	9,786

KODE				PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	25	3	02:01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	155	2.963.600.000	118	2.635.824.400	76	88,94
3	**25**	**3**	**02:02**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pemberdayaan nelayan kecil di daerah**	**100%**	**1.289.583.551**	**50%**	**67.577.000**	50	**5,24**
3	25	3	02:02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	300	16.300.000		-	0	-
3	25	3	02:02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan.Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12	1.273.283.551	3	67.577.000	25	5,31
3	**25**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**	**431,7**	**2.513.549.544**	**333,52**	##########	77	
3	**25**	**4**	**02:01**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase izin usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi pelaku usaha pembudidaya ikan dlm setahun**	**100%**	**10.000.000**	0	**10.000.000**		
3	25	4	02:01	2	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya.lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100
3	**25**	**4**	**02:02**	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**		**Persentase upaya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil di daerah**	100%	**172.200.000**	**50%**	**127.924.000**	**50**	**74,29**
3	25	4	02:02	3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan.Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10	65.300.000	15	23.924.000	150	37
3	25	4	02:02	4	Pembinaan Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Tegnologi dan Informasi Serta Penyelanggaran Pendidikan dan Pelatiihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3	106.900.000	3	104.000.000	100	97
3	**25**	**4**	**02:04**	**Pengelolaan Pembudidaya Ikan**		**Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah Dalam Setahun**	100%	2.331.349.544	50%	2.169.753.000	50%	93

KODE						PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	25	4	02:04	1		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	50.000.000	0	0	0	-
3	25	4	02:04	2		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37	1.918.205.500	17	1.844.440.000	46	96
3	25	4	02:04	3		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	358.144.044	1	320.313.000	100	89
3	25	4	02:04	4		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4	5.000.000	4	5.000.000	100	100
3	**25**	**5**		**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**Presentase keterlaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**	100%	20.000.000	50%	20.000.000	50%	100,00
3	25	5	02	01		**Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota**	**Persentase pengawasan upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara terpadu, berdasarkan peraturan perundang-undangan**	100%	20.000.000	50%	20.000.000	50%	100,00
3	25	5	02.01	1		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	100	100
3	25	5	02.01	2		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	100	100,00
3	**25**	**6**		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**	**1.267**	**376.559.000**	1.110,47	**59.855.080**	**78,56%**	15,90

KODE				PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2023	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	**25**	**6**	**02:01**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Persentase usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan skala mikro / kecil yang memiliki Tanda Daftar Usaha**	**100%**	50.000.000	**100%**	0	100%	-
3	25	6	02:01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	6	50.000.000,00	**0**	**0**	0	-
3	25	6	02.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah kelompok pengusaha pengolahan dan pemasaran yang dibina dalam hal mutu dan keamanan**	**100%**	135.559.000	**100%**	59.855.080	**100%**	44,15
3	25	6	02,02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	4	135.559.000,00	4	59.855.080,00	100	44,15
3	25	6	02,03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahan baku Industri Pengolahan Ikan**	**100%**	191.000.000	**0**	0	0	0
3	25	6	02,03	**1**	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.650	191.000.000	198	144.433.500,00	0	75,62

Lampiran 2

T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Utara 2024

NO	INDIKATOR	STANDAR SPM NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			(PP-6/'08)	Tahun 2021 (tahun n-2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*		*10*	*11*	*12*	*13*
I	**Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan**												
a	Rata-rata Nilai tukar nelayan (pertahun)	-	Perbandingan faktor produksi nelayan dengan produk (>100)	106,6	108,60	109,50	109,80	109,52	109,32	106,8			
b	Rata-rata Nilai tukar Pembudidaya (pertahun)	-	Perbandingan faktor produksi pembudidaya dengan produk (>100)										
II	**Peningkatan Produksi Perikanan**	-	Total produksi perikanan	25.400,00	27.168,70	28.682,28	30.198,88	357,60	391,872	23.794,00			
a	Jumlah produksi Perikanan Tangkap (ton)		Jumlah produksi perikanan tagkap dalam 1 tahun	25.000	26.737	28.223	29.708	25,08	23,45	23.520,00			
b	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)		Jumlah produksi perikanan budidaya dalam 1 tahun	400	431,7	459,28	490,88	332,52	368,42	274,00			
III	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (ton)		Jumlah produksi pengolahan hasil ikan dalam 1 tahun	1.100	1.393	1.462	1.501	864,17	1.110,00	1.140,00			
IV	**konsumsi ikan perkapita (kg/kapita/thn)**	-	Jumlah konsumsi ikan, udang dan ikan dalam olahan lainnya	60,25	62,45	65,4	67,85	50,12	52,42	64,35			

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Utara

Viktor O Mangimbulude, ST
Pembina Tk I /Ivb
NIP.197210212002121005

Lampiran 3

T-C.31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN thn 2025		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
1	*2*		*3*	*4*	5	6	7		8	9	*10*	11
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**DKP**	**Persentase capaian kinerja perangkat daerah sesuai Laporan Kinerja (LKj)**	**100%**	**4.183.991.844**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**100%**	**4.183.991.844**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		DKP	**Tersedianya Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***24 Dok.***	**108.000.000**	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase implementasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah**	***24 Dok.***	**108.000.000**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	59.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	59.000.000	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok.	3.500.000	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok.	3.500.000	
	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	DKP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok.	3.500.000	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	DKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	3.500.000	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	DKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap.	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap.	15.000.000	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Lap	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Lap	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**DKP**	**Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan**	**100%**	**3.410.271.844**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan**	**100%**	3.410.271.844	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	3.399.731.844	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	3.399.731.844	

	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap.	3.000.000	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap.	4.540.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Lap.	4.540.000	
	4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	3.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok.	3.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		DKP	**Presentasi pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**98.000.000**	**0**		**Presentasi pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	98.000.000	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	DKP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32	38.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32	38.000.000	
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DKP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Org	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Org	60.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**DKP**	**Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***100%***	**280.000.000**			**Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***100%***	280.000.000	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	DKP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket.	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket.	5.000.000	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket.	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket.	80.000.000	
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DKP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bln	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bln	5.000.000	
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Kali	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Kali	20.000.000	
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta,Bogor,TTE	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 OK	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 OK	150.000.000	
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**DKP**	**Presentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**136.900.000**	**Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DKP**	**Presentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	136.900.000	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	25.000.000	

	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bln.	66.700.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bln.	66.700.000	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap.	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Lap.	6.000.000	
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	39.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	39.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**DKP**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**150.820.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DKP**	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**150.820.000**	
		Penyediaan Jasa Pemneliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	DKP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	130.820.000	Penyediaan Jasa Pemneliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	DKP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	130.820.000	
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Banguna	DKP	1 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	########	20.000.000	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**	**28.223**	**1.025.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**DKP**	**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**	**28.223**	1.025.000.000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Kab Halut**	**Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun**	***100%***	**940.000.000**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**DKP**	**Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun**	***100%***	940.000.000	
	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab Halut	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dok.	35.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	DKP	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dok.	35.000.000	
	2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab Halut	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	180 Unit.	905.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	**DKP**	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	180 Unit.	905.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Kab Halut**	**Persentase pemberdayaan nelayan kecil di daerah**	**100%**	**85.000.000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pemberdayaan nelayan kecil di daerah**	**100%**	85.000.000	
	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab Halut	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	600 Orang	25.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	600 Orang	25.000.000	
	2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jkrta/TTE	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20 Kel.	60.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20 Kel.	60.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Halut**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**	**459,28**	**1.480.240.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**DKP**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**	**459,28**	1.480.240.000	

	Penerbitan izin usaha Perikanan di Bidang			**Persentase izin usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi pelaku usaha pembudidaya ikan dlm setahun**	***100%***	**15.000.000**	**Penerbitan izin usaha Perikanan di Bidang**		**Persentase izin usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi pelaku usaha pembudidaya ikan dlm setahun**	***100%***	15.000.000	
		Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Halut	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Rekom	20.000.000	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Rekom	20.000.000	
	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil			**Persentase upaya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil di daerah**	**100%**	**88.000.000**	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**		**Persentase upaya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil di daerah**	**100%**	88.000.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jkrta-TTE	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	15 Kel.	60.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	15 Kel.	60.000.000	
3		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kali	28.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kali	28.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			**Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah Dalam Setahun**	**100%**	**1.377.240.000**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah Dalam Setahun**	**100%**	1.377.240.000	
	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	DKP	4 Dok.	35.000.000	DAU		4 Dok.	4 Dok.	35.000.000	
	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	DKP	35 Unit.	600.000.000	DAK		70 Unit.	4 Dok.	600.000.000	
	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	DKP	1 Unit	532.240.000	DAU		1 Unit	4 Dok.	532.240.000	
		Oprasional BBIL Kusuri		KUSURI	1 Paket	200.000.000	DAK					
	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	DKP	2 Dok.	10.000.000	DAU		6 Dok.	4 Dok.	10.000.000	

	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			**Cakupan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (%)**	**100%**	**10.000.000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**DKP**	**Cakupan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (%)**	***100%***	10.000.000	
4		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**		**Persentase pengawasan upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara terpadu, berdasarkan peraturan perundang-undangan**	**100%**	**100.000.000**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**		**Persentase pengawasan upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara terpadu, berdasarkan peraturan perundang-undangan**	**100%**	100.000.000	
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota	8 Dok	50000000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota	8 Dok	50.000.000	
	1	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	8 Dok	50000000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	8 Dok	50.000.000	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**	**1.462**	**545.000.000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**DKP**	**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**	**1.462**	545.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			**Persentase usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan skala mikro / kecil yang memiliki Tanda Daftar Usaha**	***100%***	**35.000.000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**DKP**	**Persentase usaha pengolahan dan pemasar hasil perikanan skala mikro / kecil yang memiliki Tanda Daftar Usaha**	**100%**	35.000.000	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	6 Dok.	35.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	6 Dok.	35.000.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			**Jumlah kelompok pengusaha pengolahan dan pemasaran yang dibina dalam hal mutu dan keamanan**	**100%**	**60.000.000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**DKP**	**Jumlah kelompok pengusaha pengolahan dan pemasaran yang dibina dalam hal mutu dan keamanan**	**100%**	60.000.000	
5		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	6 Dok.	60.000.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**DKP**	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	6 Dok.	60.000.000	

	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			**Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahan baku Industri Pengolahan Ikan**	***100%***	**450.000.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**DKP**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Bahan baku Industri Pengolahan Ikan**	**100%**	450.000.000	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	16.370 Ton.	450.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	16.370 Ton.	450.000.000	

Lampiran 4

T-C.32. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PADA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	Catatan Penting (Prioritas)
1	2		4		5	10
I	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**		
	1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		
		Longboat Fiber < 3 GT	Kab Halut		10	
		Mesin 15 PK			10	
		Rumpon			2	
		Alat Tangkap (Hand line)			20	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**		
	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Kolam Air Tawar	Kab Halut		4	
		KJA Ikan Air Tawar			5	
		KJA Ikan Air Laut			2	
		Budidaya Udang Vaname		`	1	
III	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**					
	1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kab Halut	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
	2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		'Rumah Pengasapan	Kab Halut		4	
		Kendaraan Roda 3	Kab Halut		4	

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (%)**		**100%**	**4.183.991.844**			**90%**	**4.602.391.028**
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)**		**90%**	**108.000.000**			**13 Dok.**	**118.800.000**
3.25.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKP	2 Dok.	59.000.000	DAU		2 Dok.	64.900.000
3.25.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DKP	3 Dok	3.500.000	DAU		1 Dok.	3.850.000
3.25.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DKP	1 Dok.	3.500.000	DAU		1 Dok.	3.850.000
3.25.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DKP	1 Dok.	3.500.000	DAU		1 Dok.	3.850.000
3.25.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKDP	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DKP	1 Dok.	3.500.000	DAU		1 Dok.	3.850.000
3.25.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DKP	2 Lap.	15.000.000	DAU		2 Lap.	16.500.000
3.25.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKP	5 Lap.	20.000.000	DAU		5 Lap.	22.000.000
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)**		**100%**	**3.410.271.844**			**100%**	**3.751.299.028**
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKP	36Org/Bln.	3.399.731.844			36Org/Bln.	3.739.705.028
3.25.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DKP	1 Lap.	3.000.000	DAU		1 Lap.	3.300.000
3.25.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DKP	6 Lap.	4.540.000	DAU		18 Lap.	4.994.000
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DKP	1 Dok.	3.000.000	DAU		1 Dok.	3.300.000
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**		**100%**	**98.000.000**	DAU		**100%**	**107.800.000**
3.25.01.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DKP	38 Paket.	38.000.000	DAU		37 Paket.	41.800.000
3.25.01.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKP	5 Org.	60.000.000	DAU		5 Org	66.000.000
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**		**100%**	**280.000.000**	DAU		**100%**	**308.000.000**
3.25.01.2.06. 01	Penyediaanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DKP	5 Paket	5.000.000	DAU		5 Paket.	5.500.000
3.25.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP	4 Paket	80.000.000	DAU		4 Paket.	88.000.000
3.25.01.2.06. 03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKP	12 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	22.000.000
3.25.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DKP	12 Dokumen	5.000.000	DAU		12 Bln	5.500.000
3.25.01.2.06. 05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKP	24 Laporan	20.000.000	DAU		24 kali	22.000.000
3.25.01.2.06. 06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKP	18 Lap.	150.000.000	DAU		20 OK	165.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Peunnjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**100%**	**136.900.000**			**100%**	**150.590.000**
3.25.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKP	12 Lap.	25.000.000	DAU		500 surat	27.500.000
3.25.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKP	12 Lap.	66.700.000	DAU		12 Bln.	73.370.000
3.25.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKP	6 Lap.	6.000.000	DAU		6 Lap.	6.600.000
3.25.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKP	12 Lap.	39.200.000	DAU		12 Lap+ 1 OH	43.120.000
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**100%**	**150.820.000**			**100%**	**165.902.000**
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKP	2 Unit	130.820.000			1 Unit	143.902.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKP	1 Unit	20.000.000			1 Unit	22.000.000
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)**		**24.168 Ton**	**1.025.000.000**			**24.168 Ton**	**1.127.500.000**
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainya yang dapat Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan usaha penangkapan ikan serta ketersediaan sarana perikanan tangkap di daerah dalam setahun**		**100%**	**940.000.000**			**100%**	**1.034.000.000**
3.25.03.2.01. 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	DKP	4 Dok.	35.000.000	DAU		4 Dok.	38.500.000
3.25.03.2.01. 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	DKP	5	905.000.000	DAK		5 paket	995.500.000
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil di Daerah(%)**		**100%**	**85.000.000**			**100%**	**93.500.000**
3.25.03.2.02. 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	DKP	25 Org.	25.000.000	DAU		25 Org.	27.500.000
3.25.03.2.02. 02	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	DKP	10 Unit Usaha.	60.000.000	DAU		10 Unit Usaha.	66.000.000
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)**		**301,5**	**1.480.240.000**			**301,5**	**1.628.264.000**
3.25.04.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase izin usaha yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah bagi pelaku usaha pembudidaya ikan dlm setahun**		**100%**	**15.000.000**			**100%**	**16.500.000**
3.25.04.2.01.02	Pelayanan penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang izin usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	15 Rekom	15.000.000	DAU		15 Rekom	16.500.000
3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Persentase Upaya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil di Daerah**		**100%**	**88.000.000**			**100%**	**96.800.000**
3.25.04.2.02. 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	DKP	15 Kel.	60.000.000	DAU		15 Kel.	66.000.000
3.25.04.2.02. 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	DKP	10 klpk	28.000.000	DAU		6 Kali	30.800.000
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**Persentase Pengelolaan Usaha Pembudidaya Ikan di Daerah Dalam Setahun**		**100%**	**1.377.240.000**			**100%**	**1.514.964.000**
3.25.04.2.04. 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	4 Dok.	35.000.000	DAU		4 Dok.	38.500.000
3.25.04.2.04. 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	5 Unit.	600.000.000	DAK		5 Unit.	660.000.000
3.25.04.2.04. 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	1 Unit	532.240.000	DAU		1 Unit	585.464.000
	Oprasional BBIL Kusuri		KUSURI	1 Paket	200.000.000	DAK		100%	220.000.000
3.25.04.2.04. 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	DKP	2 Dok.	10.000.000	DAU		2 Dok.	11.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.0.5	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**PRESENTASI KETERLAKSANAAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN dan PERIKANAN**	DKP	2kali	**20.000.000**	**DAU**		**100%**	22.000.000
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan diWilayah Sungai , Danau,Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota**	**Persentase kawasan sumberdaya yang diawasi**	DKP	100%	**20.000.000**	**DAU**		**100%**	22.000.000
3.25.05.2.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	DKP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	11.000.000
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	DKP	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	11.000.000
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)**	DKP	1.462	**545.000.000**	DAU		1.462	**599.500.000**
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya (dokumen)**	DKP	**100%**	**35.000.000**			**100%**	**38.500.000**
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	DKP	4 Dok.	35.000.000	DAU		6 Dok.	38.500.000
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah pengujian produk olahan hasil perikanan (Dok)**	DKP	**100%**	**60.000.000**			**100%**	**66.000.000**
3.25.06.2.02.02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	DKP	6 Unit Usaha	60.000.000	DAU		6 Unit Usaha	66.000.000
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ikan yang tersalurkan sebagai bahan baku industri (Ton)**	DKP	**100%**	**450.000.000**			**100%**	**495.000.000**
3.25.06.2.03. 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKP	1200 Ton	450.000.000	DAK/DAU		1200 Ton	495.000.000
JUMLAH TOTAL					**7.254.231.844**				**7.979.655.028**